



**RENCANA KERJA PERUBAHAN
KECAMATAN TARAKAN TENGAH
KOTA TARAKAN TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta 'ala atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Tarakan Tengah Tahun 2025. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tarakan Tengah Tahun 2025 disusun berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2026 yang telah ditetapkan dan merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 2 (dua) tahun ke depan.

Berdasarkan pada hasil evaluasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan/sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Kecamatan Tarakan Tengah Tahun Anggaran 2025, melalui Rencana Kerja Perubahan ini diharapkan dapat memberikan gambaran rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

Tarakan, 28 Juli 2025

Camat,



Andry Rawung, S.STP.,M.H
NIP. 19850723 200312 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL..... iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1.Latar Belakang 1

1.2.Landasan Hukum..... 4

1.3.Maksud dan Tujuan 6

1.4.Sistematika Penulisan 7

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA..... 9

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja TW 1 11

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tarakan Tengah..... 24

2.3. Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kerja
Kecamatan Tarakan Tengah 29

2.4. Review terhadap Renja Murni Perangkat Daerah 23

2.5.Penelaahan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 43

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 46

3.1. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tarakan Tengah 46

3.2.Pendanaan Rencana Kerja Kecamatan Tarakan Tengah 56

BAB IV PENUTUP 57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kerja Kecamatan Tarakan Tengah dan Pencapaian DALEV TW 1..... 10

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Kecamatan Tarakan Tengah 25

Tabel 2.3 Permasalahan Yang di hadapi Kecamatan Tarakan Tengah 30

Tabel 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 36

Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tarakan Tengah Tahun 2025 47

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Tarakan Tengah, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renja Perubahan OPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran OPD, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tarakan. Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Tarakan Tengah maka disusunlah Renja Perubahan (Rencana Kerja Perubahan) Tahun 2025 sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

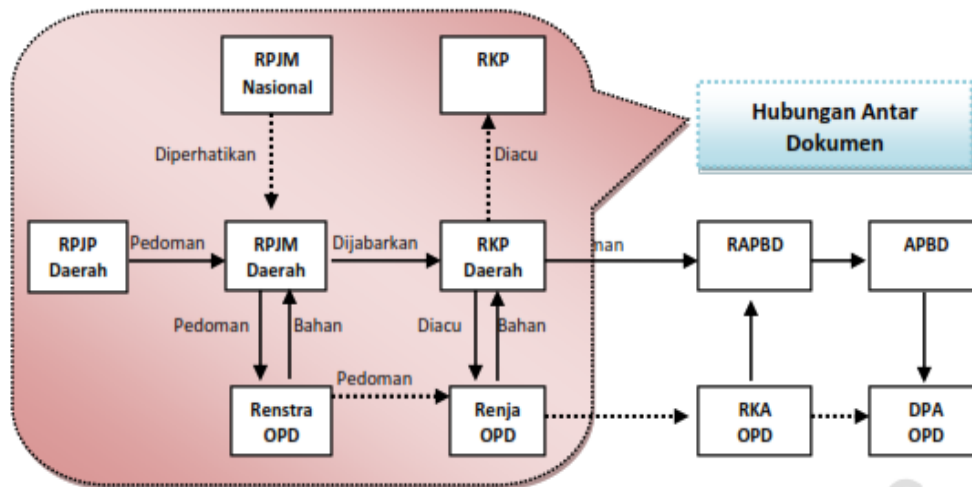
Renja Perubahan merupakan proses penjabaran dari tujuan dan sasaran dalam renstra yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, sebelum program dan kegiatan dilaksanakan serta mencantumkan target dan ketersediaan anggaran untuk setiap program dan kegiatan. Uraian tentang Renja perubahan yang dicapai pada tahun yang bersangkutan berisi indikator, sasaran, program, kegiatan, rencana capaiannya serta keterkaitan antara kegiatan dan sasaran, kebijakan dan program. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tarakan Tengah Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Kecamatan Tarakan Tengah Tahun 2025 - 2026, dimana tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun ke satu dalam periode Renstra Kecamatan Tarakan Tengah Tahun 2025 - 2026 yang di arahkan sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pada satu tahun anggaran berjalan sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang telah di tetapkan.

Rancangan Renja Perubahan Kecamatan Tarakan Tengah disusun berdasarkan :

- [illegible]

Renja Perubahan Kecamatan Tarakan Tengah sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup satuan kerja merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Tarakan Tengah yang merupakan rencana

pembangunan jangka waktu dua tahun. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan sebagai sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.2 Bagam Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

Penyusunan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025 - 2026 merupakan rangkaian yang berkesinambungan, mulai dari tahap persiapan sampai dengan penetapan Perda tentang RPJMD. Pada tahap persiapan telah dilakukan penyusunan Rancangan teknokratik RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025 - 2026, Hasil dari Rancangan Teknokratik RPJMD menjadi salah satu input bagi penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Selanjutnya, Rancangan Awal disusun dan disempurnakan dengan hasil konsultasi publik, pembahasan dan kesepakatan dengan DPRD Kota Tarakan serta hasil konsultasi ke Gubernur Kalimantan Utara.

Rancangan Awal yang telah disempurnakan selanjutnya menjadi

dasar bagi perangkat daerah untuk menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Hasil dari penyempurnaan Renstra PD menjadi rancangan Renstra menjadi masukan untuk perumusan Rancangan RPJMD dan siap untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD. Hasil musrenbang RPJMD menjadi masukan untuk penyempurnaan menjadi rancangan Akhir RPJMD. Rancangan Akhir RPJMD selanjutnya diajukan ke DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi perda tentang RPJMD. Selanjutnya, RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025 - 2026 yang disusun akan menjadi dasar bagi seluruh perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah tahun 2025 - 2026 . Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategik di RPJMD dengan perencanaan operasional di perangkat Daerah. Renstra-PD merupakan rencana kerja yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan perangkat Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana termuat dalam RPJMD serta penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Tarakan Tengah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Tarakan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2021-2041;
10. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Kecamatan Tarakan Tengah;
12. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2021 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota Kepada Camat Tarakan Tengah Dalam Pengelolaan Kawasan Kuliner di Jalan P. Diponegoro Kelurahan Sebengkok. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota No. 47 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat Tarakan Tengah

Dalam Pengolaan Kawasan Kuliner di Jalan P. Diponegoro Kelurahan Sebengkok;

13. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pada Kecamatan;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2024 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2024;
15. Perwali Nomor 18 Tahun 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 tanggal 30 Juni 2025
16. Surat Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor : 100.3.3.3/HK-II/71/2025 Tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daaerah Tahun 2025 pada Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini untuk memantapkan kinerja Kerja Kecamatan Tarakan Tengah sehingga lebih akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam keberhasilan mencapai tujuan dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik (*Good Government*) dengan penyelenggaraan seiring dalam perwujudan pelaksanaan sistem pertanggungjawaban kinerja yang lebih jelas, tepat dan terukur. Adapun Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini adalah:

1. Untuk menerjemahkan Perencanaan Strategis dua Tahunan yang dituangkan dalam Renstra Kerja Kecamatan Tarakan Tengah ke dalam Perencanaan Tahunan yang sifatnya lebih operasional; dan
2. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap

Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman dalam 1 (satu) tahun.

Sedangkan Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tarakan Tengah adalah:

1. Sebagai acuan Kerja Kecamatan Tarakan Tengah dalam mengoperasionalkan dan memaksimalkan pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Kecamatan Tarakan Tengah
2. Menetapkan program dan kegiatan serta sub kegiatan perubahan Kecamatan Tarakan Tengah tahun 2025;
3. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan .
4. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Kecamatan Tarakan Tengah Tahun 2025, sehingga terjadi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam APBDP Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Tarakan Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja Perubahan, landasan hukum penyusunan Renja Perubahan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perubahan dan sistematika penulisan dokumen Renja Perubahan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TARAKAN TENGAH

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Kecamatan Tarakan Tengah sampai Triwulan I dan capaian Renstra Kecamatan Tarakan Tengah, analisis kinerja pelayanan

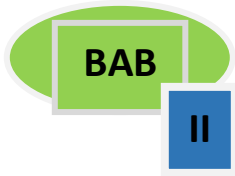
Kecamatan Tarakan Tengah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tarakan Tengah, review terhadap Renja Murni PD Tahun 2025 serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TARAKAN TENGAH

Bab ini memuat Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan perubahan pada Kecamatan Tarakan Tengah Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.



EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI TRIWULAN I

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap dokumen perencanaan harus di evaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Kerja Perubahan Kecamatan Tarakan Tengah Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan dan hasil rencana program dan kegiatan. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kerja Perubahan Kecamatan Tarakan Tengah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Kerja Kecamatan Tarakan Tengah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Kerja Kecamatan Tarakan Tengah, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Pada tahun 2025, Kecamatan Tarakan Tengah melaksanakan 5 (lima) Program, 12 (dua belas) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.464.865.198,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.698.428.190,- atau 21.38%.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta realisasi anggaran yang dilaksanakan pada TW I dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan Kerja Kecamatan Tarakan Tengah
Dan Pencapaian Dalev Triwulan I Tahun 2025 Kecamatan Tarakan Tengah.

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024				Target program dan kegiatan Renja PD Tahun 2026		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025			
1	2	3	4	5			Target	Satuan	Target	Satuan	Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja PD Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)	Target	Satuan	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d TW I Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) = (10/4)
											Target	Satuan	Realisa si	Satuan				Realisasi	Satuan	
		1					2	3	4		5		6		7		8	9		10
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1				KECAMATAN															
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%	50	%	50%
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersedia	3	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Dokumen	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporah hasil koordinasi penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Laporan	
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

					Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	2	Layanan	2	Layanan	2	Layanan	2	Layanan	100	2	Layanan	2	Laporan	100%
7	01	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	70	Orang	70	Orang	70	org	70	Orang	100	84	orang	69	orang	99%
7	01	01	202	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	dok	100	12	dokumen	3	dokumen	25%
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi Kepegawaian	1	Layanan	-	-	1	Layanan	1	Layanan	100	-	-	-	-	-
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	70	Paket	-	-	70	paket	70	paket	100	84	paket	-	-	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	5	Layanan	4	kegiatan	6	layanan	4	Layanan	67	6	layanan	5	Layanan	100%
7	01	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen Instalasi Listrik/Penerangan kantor yang tersedia	4	Paket	2	jenis	4	paket	4	paket	100	8	paket	2	paket	50%
7	01	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	32	Paket	47	jenis	38	paket	38	paket	100	38	paket	25	paket	78%
7	01	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3	Paket	6	jenis	3	paket	3	paket	100	3	paket	3	paket	100%

					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	8	Laporan	-	-	12	laporan	12	laporan	-	8	laporan	2	laporan	25%
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2	Laporan	4	laporan	2	laporan	2	laporan	100	2	laporan	2	laporan	100%
7	01	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan	5	unit	23	Unit	18	unit	18	unit	100	5	unit	3	unit	60%
7	01	01	207	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	5	unit	10	unit	18	unit	18	unit	100	5	unit	3	unit	60%
7	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	3	Layanan	3	Layanan	3	layanan	3	Layanan	100	3	layanan	3	Layanan	100%
7	01	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	laporan	2	laporan	6	laporan	6	laporan	100	2	laporan	2	laporan	100%
7	01	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100	12	laporan	3	laporan	25%

7	01	01	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100	12	laporan	3	laporan	25%
7	01	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	4	Layanan	39	Unit	17	jenis	17	jenis	100		unit		unit	
7	01	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	33	Unit	39	unit	33	unit	33	Unit	100	33	unit	5	unit	15%
7	01	01	209	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	9	Unit	7	Unit	9	unit	9	Unit	100	9	unit	9	unit	100%
7	01	01	209	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6	Unit	1	Unit	1	unit	1	unit	100	6	unit	0		0%

					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	81	Unit	14	Unit	6	unit	6	Unit	100	6	unit	0	-
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		100	persen	-	-	100	persen	100	persen	100	100	persen		
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Jumlah Kegiatan Pemerintahan yang dilimpahkan	1	layanan	-	-	1	Layanan	-	-	-	1	laporan	0	laporan 0%
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	1	Laporan	-	-	1	laporan	-	laporan	100	1	laporan	0	laporan 0%
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%	25%	% 0%
7	01	03	202		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3	Kegiatan	1	kegiatan	3	kegiatan	1	jens kegiatan	100	3	kegiatan	3	Kegiatan 100%
7	01	03	202	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	6	lembaga	6	lembaga	6	lembaga	6	lembaga	100	6	lembaga	6	lembaga 100%
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terbangun/dikembangkan	15	Unit	-	Unit	15	unit	15	unit	100	15	unit	0	unit 0%

					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat Kelurahan	5	ormas	-	-	5	pokmas	5	ormas	100	5	ormas/pokmas	5	ormas/pokmas	100%
7	01	03	203		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1	kegiatan	1	kegiatan	1	kegiatan	1	kegiatan	100	1	kegiatan	1	Kegiatan	100%
7	01	03	203	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	3	lembaga	3	lembaga	3	lembaga	3	lembaga	100	3	lembaga	3	lembaga	100%
					Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	persen			
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	kegiatan	1	kegiatan	1	Kegiatan	1	kegiatan	100	1	kegiatan			
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	1	laporan	1	laporan	1	laporan	100	1	laporan			
					Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1	Kegiatan	1	kegiatan	1	Kegiatan	1	kegiatan	100	1	kegiatan			

					Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	laporan	5	laporan	1	laporan	1	laporan	100	1	laporan			
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%	25	%	25%
7	01	05	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang di selenggarakan	2	Layanan	2	Layanan	2	Layanan	2	Layanan	100	2	Layanan	1	Layanan	50%
7	01	05	201	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	40	orang	40	orang	40	orang	40	orang	100	40	orang			-

7	0 1	0 5	20 1	0 5	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan Konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	15	laporan/konflik	5	Laporan	20	laporan	2	laporan	10	15	laporan	1	laporan	-
---	--------	--------	---------	--------	---	--	----	-----------------	---	---------	----	---------	---	---------	----	----	---------	---	---------	---

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kerja Perubahan Kecamatan Tarakan Tengah Tahun 2025 berdasarkan target Indikator Kinerja Program Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Adapun Capaian Realisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan Indikator Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kelurahan mencapai 14,83% dari target yang ditentukan yaitu 100%

Dengan dukungan kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan. Dengan realisasi sebesar 3,89% dari target 100%. Tidak tercapainya target dalam kegiatan ini disebabkan karena sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan belum terlaksana di triwulan I dan akan dilaksanakan di Triwulan II
- b. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan. Dengan realisasi sebesar 23,02%. Dari target 100%.

2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Adapun Capaian Realisasi Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Indikator Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kelurahan mencapai 0% dari target yang ditentukan yaitu 100%

Dengan dukungan kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah memiliki 2 Sub Kegiatan yaitu :

1. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional. Dengan Realisasi Kinerja sebesar 0% dari target 100%. Hal ini dikarena kegiatan tersebut dilaksanakan pada triwulan III.

2. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan

Dengan realisasi kinerja 0% dari target 100%. Hal ini dikarenakan mediasi konflik selesai di tingkat kelurahan.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Capaian Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota dengan Indikator Persentase capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota mencapai 24,48% dari target yang ditentukan yaitu 100%

Dengan dukungan kegiatan sebagai berikut:

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :

1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan target 33,09% dan realisasi 100% sedangkan realisasi keuangan sebesar 28,83%
2. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dengan target 26,30% dan realisasi fisik 22,25% . Hal ini dikarenakan Honor PPKOM dan PPBJ di bayarkan hanya sesuai dokumen yang bertanda tangan saja.

b. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub Kegiatan :

1. Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan target 25% dan telah terealisasi sebesar 25,97%. Hal ini dikarenakan kebutuhan komponen instalasi listrik dapat terpenuhi
2. Penyediaan bahan logistik kantor dengan target 25% dan telah terealisasi sebesar 22,87%. Hal ini dikarenakan kebutuhan ATK dan alat kebersihan sudah terpenuhi sesuai keperluan Kecamatan dan Kelurahan.
3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan target 25 % dan telah terealisasi 23,97% . Hal ini dikarenakan kegiatan cetak dan penggandaan sudah dilaksanakan sesuai permintaan dan kebutuhan Kecamatan dan Kelurahan.

c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :

1. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya dengan target 0% dan realisasi 0%. Hal ini dikarenakan pengadaan sarana dan prasarana dilaksanakan Triwulan II
- d. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan sub kegiatan :
1. Penyediaan jasa surat menyurat dengan target 50% dan telah terealisasi sebesar 50%. Hal ini dikarenakan pembelian materai telah di lakukan dan di bagikan untuk Kecamatan dan kelurahan.
 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan target 25% dan telah terealisasi sebesar 23,72%. Hal ini dikarenakan pembayaran rekening telp, air dan listrik yang tidak tetap jumlahnya setiap bulan.
 3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan target 25% dan telah terealisasi sebesar 22.71%. Hal ini dikarenakan terdapat 1 (satu) jabatan kosong. Yaitu Jabatan Kapolsek Tarakan Tengah. Sehingga honorariumnya tidak bisa di proses.
- e. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan sub kegiatan :
1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan target 5,63% dan telah terealisasi 6,56%. Hal ini di karenakan pembayaran pajak kendaraan bermotor milik kecamatan Tarakan tengah telah di bayarkan sesuai jadwal yang telah di tentukan.
 2. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan target 14,40% dan terealisasi sebesar 0%. Hal ini dikarenakan kendaraan operasional di kecamatan dan kelurahan belum melakukan perbaikan.
 3. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya dengan target 50 % dan

terrealisasi 0%. Hal ini dikarenakan kegiatan pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana belum melakukan perbaikan barang.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN TARAKAN TENGAH.

Tugas Kerja Kecamatan Tarakan Tengah dalam pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan Kerja Kecamatan Tarakan Tengah perlu upaya-upaya strategis yang secara menyeluruh dan terpadu meliputi perumusan kebijakan program operasional dan kegiatan-kegiatan. Untuk itu dibutuhkan jalinan kerja sama yang kuat dan kepercayaan antara masyarakat dan instansi terkait.

Keberhasilan program dan Kegiatan Kecamatan Tarakan Tengah sulit untuk terwujud jika tidak didukung oleh berbagai faktor internal antara lain perencanaan program yang akuntabilitas, aparat yang terampil serta dukungan dana yang memadai. Sedangkan yang menjadi faktor eksternalnya adalah bentuk kepercayaan masyarakat terhadap program-program yang ditawarkan Kecamatan Tarakan Tengah mengacu pada satu tujuan mewujudkan visi dan misi Kota Tarakan yang akan dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan beserta program prioritas.

Berdasarkan Renstra Kerja Kecamatan Tarakan Tengah dan evaluasi capaian target kinerja Kerja Kecamatan Tarakan Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, bahwa realisasi capaian kinerja pelayanan Kerja Kecamatan Tarakan Tengah secara umum sampai dengan tahun 2025 belum memenuhi target. Kendala yang ada sampai saat ini adalah terbatasnya sarana dan prasarana dan SDM yang belum memadai yang sesuai dengan kebutuhan dalam peningkatan kinerja Kecamatan Tarakan Tengah.

Keberhasilan kinerja Kecamatan Tarakan Tengah dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Kecamatan Tarakan Tengah dapat dilihat pada **tabel 2.2** berikut ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kerja Kecamatan Tarakan Tengah

No	Indikator	SPM /	Target IKU/IKK	Target Renstra Tahun 2019 s/d 2024				Realisasi	Proyeksi	Catatan Analisis
		Standar Nasional						Capaian		
				2021	2022	2023	2024	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PREDIKAT SAKIP KECAMATAN		60/CC	60/CC	61/CC	62/CC	63/CC	71,99/ BB	70/BB	
2	IKM KECAMATAAN		85	78/B	80	80	80	90,38	90,38	
3	PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	PERSENTASE KEGIATAN KEAGAMAAN		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	PERSENTASE FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH KERUKUNAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kinerja pelayanan Kecamatan Tarakan Tengah Kota tarakan yang di analisis berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Kecamatan Tarakan Tengah Tahun 2025 berdasarkan target Indikator Kinerja Program Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Predikat Sakip Kecamatan

Target Predikat Sakip Kecamatan Tarakan Tengah Tahun 2024 bernilai 63/CC dan realisasi capaian sebesar 71,99/BB. tercapainya target karena disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

A. Meningkatnya pemahaman SDM terkait pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah sehingga andal dalam penyampain informasi mengenai Kinerjanya pada dokumen LKIP, seperti terpenuhnya syarat adanya sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten), dapat ditelusuri sumber datanya, dapat di verifikasi oleh masyarakat

B. Penyusunan Renstra Perubahan tidak ditetapkan ukuran keberhasilan Indikator terhadap tujuan Organisasi pada Dokumen Renstra dan akan menjadi bahan penyusunan Renstra periode selanjutnya.

C. Dokumen Renstra Kecamatan Tarakan Tengah telah terpublikasi secara resmi melalui Webside Resmi Pemerintah kota Tarakan ,atau media lainnya agar mudah di akses masyarakat.

2. IKM Kecamatan

A. Secara umum kualitas pelayanan pada Kecamatan Tarakan Tengah dipersepsikan Baik oleh masyarakat penggunanya. Hal ini terlihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh yaitu berkisar di antara 76,61-88,30. Nilai IKM yang diperoleh yaitu : pada 9 unsur pelayanan = 90,38;

B. Unsur pelayanan yang dianggap paling memuaskan oleh responden adalah Kesesuaian/ Kewajaran Biaya (3.740)

C. Dari 9 unsur pelayanan, 2 (dua) unsur yang memiliki NRR terendah adalah :

a. Kualitas Sarana dan Prasarana (3.220)

b. Kecepatan Pelayanan (3.360)

D. Hal-hal yang dimungkinkan dapat mempengaruhi skoring pelayanan dalam pengisian :

- a. Minimnya anggaran yang dimiliki untuk biaya peremajaan perlengkapan Pelayanan Kantor.
- b. Terbatasnya pemahaman masyarakat terkait jenis pelayanan yang ada di Kecamatan Tarakan Tengah seperti pelayanan Surat Keterangan hak Milik kapal / Legalisasi Surat Keterangan Tukang (warga terbiasa dengan format permohonan yang model lama sebelum perwali No. 30 Tahun 2021 /01 Oktober 2021) sehingga kecepatan pelayanan berkurang karena warga perlu memahami kembali terkait format pelayanan yang baru di Kecamatan Tarakan Tengah.

3. Presentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif

Adapun Lembaga Kemasyarakatan yang ada dan aktif di Kecamatan Tarakan Tengah tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. RT berjumlah 131 orang
2. RW berjumlah 11 orang
3. Dasawisma berjumlah 541 orang
4. Karang Taruna berjumlah 5
5. PKK berjumlah 5
6. LPM berjumlah 5
7. Posyandu berjumlah 45

4. Persentase kegiatan keagamaan

Realisasi Persentase kegiatan keagamaan di tahun 2025 masih 0%. Karena kegiatan MTQ tahun 2025 akan dilaksanakan pada Triwulan ke 3. Semua kelurahan mengirimkan perwakilan khalifah yang sesuai dengan jenis bidang lomba, selanjutnya pemenang akan di ikutkan ke Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Kota Tarakan.

5. Kinerja Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat Pengelolaan Kawasan Kuliner yang di limpahkan kewenangannya kepada Kecamatan Tarakan Tengah di atur dalam Peraturan Wali

Kota Tarakan Tahun 2021 NOMOR 3 TAHUN 2021 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Wali kota kepada Camat Tarakan Tengah Dalam Pengelolaan kawasan kuliner di Jalan P. Diponegoro Kelurahan Sebengkok dan Peraturan Wali Kota Tarakan No. 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat Tarakan Tengah Dalam Pengelolaan Kawasan Kuliner di Jalan P. Diponegoro Kelurahan Sebengkok. Pelimpahan itu dimaksudkan agar Kawasan kuliner yang berada di Kelurahan Sebengkok dapat lebih dioptimalkan pengelolaannya dan penataannya oleh Kecamatan Tarakan Tengah. Pelimpahan kewenangan yang dimaksud adalah ;

1. Pengaturan tempat pedagang dan kebersihan
2. Penarikan retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi pelayanan sampah/kebersihan
3. Penyediaan fasilitas pendukung

Pengukuran pencapaian sasaran instansi merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja.

Realisasi Persentase capaian kinerja urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sampai dengan Triwulan I tahun 2025 adalah 0%. Hal ini dikarenakan penataan kawasan kuliner di kelurahan Sebengkok dilaksanakan pada Triwulan ke 3.

6. Persentase Fasilitasi Penyelesaian Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan

Sesuai Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2020 salah satu tugas dari Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Serta menyelenggarakan salah satu fungsi

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya.

Realisasi Persentase fasilitasi penyelesaian masalah kerukunan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Tarakan Tengah sampai dengan Triwulan I tahun 2025 adalah 0% hal ini dikarenakan kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dilaksanakan pada Triwulan ke 3.

2.3 ISU-ISU STRATEGIS PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KERJA KECAMATAN TARAKAN TENGAH

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Tarakan Tengah, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Kecamatan Tarakan Tengah.

Isu-isu penting merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi Kecamatan Tarakan Tengah. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tarakan Tengah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tarakan Tengah. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Kecamatan Tarakan Tengah senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Pada tataran kebijakan Kecamatan Tarakan Tengah dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Tarakan Tengah sebagai berikut :

1. Urusan Tata pemerintahan
2. Urusan Pemberdayaan Masyarakat
3. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian / Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Tarakan Tengah, sebagai berikut :

TABEL 2.3
Permasalahan Yang Dihadapi Kecamatan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1	Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya	1. Belum optimalnya koordinasi antar bidang, dan antar SKPD yang salah satu akibatnya adalah belum tepatnya jadwal perencanaan	1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2	Bergesernya penampungan aspirasi masyarakat sebagai wujud dari <i>bottom up planning</i> dari musrenbang ke mekanisme lain yang kurang sesuai aturan (cenderung ke "jalan pintas");	2.Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan hasil Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan.	2. Ketersediaan dukungan dana dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
3	Masih lemahnya koordinasi antar	3.Lemahnya komitmen multi pihak dan	3.Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para

	SKPD dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan	kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat dasar yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku menempuh jalan pintas (<i>shortcutting</i>).	aparatus pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
4	Kurangnya pemanfaatan sumber daya perencanaan, baik <i>hardware</i> , <i>software</i> , maupun <i>brainware</i> .	4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien. 5. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan yang memadai.	6. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.

Pada tataran kebijakan Kecamatan Tarakan Tengah dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Tarakan Tengah sebagai berikut :

- a. Urusan Tata pemerintahan
- b. Urusan Pemberdayaan Masyarakat
- c. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Adapun isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan dalam kurun waktu 2025-2026, adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan adalah restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan

(mekanisme dan standar operasional prosedur), pelayanan perijinan, sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen kepegawaian daerah, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem pengawasan dan pengendalian internal serta artikulasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan dasar hukum reformasi birokrasi dalam implementasi Reformasi Birokrasi, seyogyanya Pemerintah baik pusat maupun daerah menelaah dan menerapkan kedelapan area perubahan, dimana kedelapan area perubahan tersebut adalah :

1. Manajemen perubahan
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Penataan Tatalaksana

5. Penataan sistem manajemen SDM
6. Penguatan Akuntabilitas
7. Penguatan Pengawasan
8. Penguatan Kualitas Pelayanan publik

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal publik. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan Pemerintahan yang baik. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai “pelayan masyarakat”. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pendayagunaan aparatur pemerintah kota dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi

guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik.

3. Restrukturisasi Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan yang ramping, struktur, kaya fungsi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan / organisasi menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan restrukturisasi kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan masing-masing elemen di daerah, yaitu masyarakat umum sebagai pemangku kepentingan, Pemerintah Daerah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai *shareholder*. Jika demikian halnya, maka manajemen sektor publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan profesionalisme birokasinya, melalui penataan pegawai, meninjau kembali model pendidikan dan pelatihan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

2.4 REVIEW TERHADAP RENCANA KERJA AWAL PD

Review terhadap rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Kecamatan Tarakan Tengah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Tarakan Tengah, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Kecamatan Tarakan Tengah berdasarkan Rancangan Awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

Review terhadap rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dapat dijabarkan pada **Tabel 2.4** di bawah ini

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kota Tarakan

Perangkat Daerah : Kecamatan Tarakan Tengah

No	Rancangan Awal 2025				Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting (Penjelasan /Rincian)
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	100%	#####	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	100%	10,808,496,040	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersedia	1 Layanan	500,000	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersedia	1 Layanan	5,500,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	500,000	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan capaian kinerja dan	1 Laporan	500,000	Dokumen Sakip

					ikhtisar realisasi kinerja SKPD			
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	0	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5,000,000	Makan Minum
					Makan Minum Rapat	250 Kotak	5,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	2 layanan	9,424,739,699	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	2 layanan	9,420,689,699	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 orang/bulan	9,243,923,699	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 orang/bulan	9,243,923,699	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20 dokumen	180,816,000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	176,766,000	
	Admministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian	2 Layanan	39,500,000	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian	2 Layanan	48,250,000	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	3 Unit	15,000,000	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	3 Unit	15,000,000	Mesin Absensi Kecamatan dan Kelurahan
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	70 Paket	24,500,000	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	95 Paket	33,250,000	Batik ASN dan Non ASN Kecamatan dan Kelurahan

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang terlaksana	5 Layanan	226,570,600	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang terlaksana	5 Layanan	185,065,640	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 Paket	32,000,000	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 Paket	10,495,040	
	Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	38 Paket	100,000,000	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	38 Paket	80,000,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 Paket	30,170,200	Jumlah paket barang cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 Paket	30,170,200	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	8 Laporan	15,000,000	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	8 Laporan	15,000,000	Makan Minum Rapat Kecamatan & Kelurahan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2 Laporan	49,400,400	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5 Laporan	49,400,400	lomba kelurahan/ kegiatan provinsi dan nasional/rak or camat
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan	1 Layanan	350,221,987	Jumlah aset/BMD yang diadakan	1 Layanan	350,221,987	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	51 Unit	350,221,987	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	51 Unit	350,221,987	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	3 Layanan	524,254,314	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	3 Layanan	524,254,314	

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	3,780,000	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	3,780,000	Materai
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	350,701,554	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	350,701,554	Telp, listrik, air, Internet dan TV kabel
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	169,772,760	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	169,772,760	Honor Babinsa, Babinkamti bmas danramil, kapolsek dan kawasan kuliner
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	4 Layanan	274,514,400	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	4 Layanan	274,514,400	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	39 Unit	15,000,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	39 Unit	15,000,000	STNK
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	3 Unit	24,514,400	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	3 Unit	24,514,400	PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6 Unit	200,000,000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6 Unit	200,000,000	PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR KECAMATAN

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 Unit	35,000,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 Unit	35,000,000	PEMELIHARAAN SARANA & PRASARAN KANTOR
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	25,000,000	Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	25,000,000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan yang dilimpahkan	1 layanan	25,000,000	Jumlah Kegiatan Pemerintahan yang dilimpahkan	1 layanan	25,000,000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	1 laporan	25,000,000	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	1 laporan	25,000,000	Pemeliharaan Rombong (50 rombongan)
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	2,233,400,000	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	3,278,244,000	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 Kegiatan	102,000,000	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 Kegiatan	1,146,844,000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	6 lembaga	40,000,000	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	6 lembaga	40,000,000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun/dikembangkan	1 kegiatan	50,000,000	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun/dikembangkan	15 kegiatan	750,000,000	ADK Fisik

	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat Kelurahan	33 okmas/ormas	12,000,000	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat Kelurahan	33 okmas/ormas	356,844,000	ADK NON FISIK
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 layanan	#####	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 layanan	2,131,400,000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang di selenggarakan	3 lembaga	#####	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang di selenggarakan	3 lembaga	2,131,400,000	Insentif RT, RW, Dasawisma dan Pelantikan Ketua RT
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	30,000,000	Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	30,000,000	1
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 kegiatan	5,000,000	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 kegiatan	5,000,000	1 Kegiatan
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	5,000,000	Jumlah laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	5,000,000	sosialisasi 74 orang, 1 hari
					Makan Minum kegiatan		4,440,000	
					Honorarium dan baliho		560,000	

	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 kegiatan	25,000,000	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 kegiatan	25,000,000	1 Kegiatan
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 laporan	25,000,000	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 laporan	25,000,000	Administrasi Kependudukan (5 kelurahan)
	Program Penyelenggaraan Urusan Umum	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	218,500,000	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	311,699,840	1
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang di selenggarakan	2 Layanan	218,500,000	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang di selenggarakan	2 Layanan	311,699,840	2 Layanan
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	40 orang	198,500,000	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas	40 orang	291,699,840	40 Orang

					Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan Konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang- undanganSosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	15 laporan konflik	20,000,000	Jumlah laporan Konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang- undanganSosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	15 laporan konflik	20,000,000	Mediasi / makan minum konflik
TOTAL				#####	TOTAL	14,453,439,880		

2.5 PENELAAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Tarakan Tengah akan melaksanakan 5 Program yang didalamnya terdapat 12 kegiatan dan 25 sub kegiatan dengan jumlah pagu anggaran sebesar **Rp. 14.962.780.890,29** dan serapan anggaran mencapai **40,23 %** atau sebesar **Rp. 6.019.003.849,00**

Adapun program yang berkaitan dengan renstra telah mencapai hasil yang cukup maksimal, diantaranya:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pelaksanaan program ini ditunjang oleh 5 (lima) kegiatan yaitu :

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan
 1. penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 2. Penyediaan Administrasi dan pelaksanaan tugas ASN
- Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 1. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 2. Penyediaan bahan logistik kantor
 3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 4. Fasilitas Kunjungan Tamu
- 5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan dengan sub sub kegiatan:

Pengadaan sarana & prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub kegiatan :
 1. Penyediaan jasa surat menyurat
 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :

- 1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- 2. Penyediaa jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas
- 3. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Pelaksanaan Program ini di tunjang oleh Kegiatan :

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Pelaksanaan Program ini di tunjang oleh Kegiatan :

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan sub kegiatan :
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
4. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan sub kegiatan : Penyelenggaraan Lembaga kemasyarakatan.

4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pelaksanaan program ini ditunjang kegiatan :

1. Koordinasi Upaya dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan sub kegiatan : Sinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi di Wilayah Kecamatan.
2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya dibidang

Penegakan Peraturan Peundang – undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

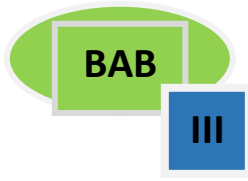
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Pelaksanaan program ini ditunjang kegiatan :

Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah dengan sub kegiatan :

1. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.
2. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Penalaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2025 yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Kecamatan Tarakan Tengah



PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TARAKAN TENGAH

3.1 PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Tarakan Tengah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Kecamatan Tarakan Tengah Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.1 adalah sebagai berikut :

TABEL 3.1
PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN TARAKAN TENGAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2025

No	KODE					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD 2025			PENJABARAN APBD 2025			RENJA PERUBAHAN 2025			KET.
							Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Kecamatan Tarakan Tengah			14.464.865.198			14.962.780.890,29			15.837.811.040,29	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			14.464.865.198			14.962.780.890,29			15.837.811.040,29	
	7	01				KECAMATAN			14.464.865.198			14.962.780.890,29			15.837.811.040,29	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %	10.374.462.418	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %	10.415.028.610,29	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %	10.887.766.260,29	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi yang tersedia	3 Layanan	8.999.520	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi yang tersedia	3 Layanan	7.653.520	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi yang tersedia	3 Layanan	7.653.520	
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.000.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.700.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.700.000	
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.700.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.700.000	
	7	01	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	4.999.520	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	4.253.520	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	4.253.520	

	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	2 Layanan	9.516.764.798	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	2 Layanan	9.672.790.170,29	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	2 Layanan	9.679.310.170,29	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	9.412.158.798	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	9.568.184.170,29	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	9.568.184.170,29	
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	104.606.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	104.606.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	111.126.000	Penambahan Honor PPKOM Dana kelurahan
													Bendahara Pengeluaran Kecamatan		13.080.000	
													Bendahara Pengeluaran Pembantu Kecamatan		7.260.000	
													Bendahara Penerima		4.080.000	
													Operator Simda / SIPD		6.000.000	
													Pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM) Kecamatan		8.400.000	
													Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kecamatan		9.816.000	
													Pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM) Dana Kelurahan		9.690.000	
													Pengurus Barang Kecamatan		10.800.000	
													Pengurus Barang Pembantu Kelurahan		42.000.000	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian	2 Layanan	0	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian	2 Layanan	0	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian	2 Layanan	0	
	7	01	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	0	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	0	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	0	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70 Paket	0	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70 Paket	0	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70 Paket	0	

	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	5 Layanan	175.907.400	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	5 Layanan	148.865.020	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	5 Layanan	172.890.320	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	10.491.700	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	10.491.700	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	10.491.700	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	38 Paket	79.998.400	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	38 Paket	79.998.400	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	38 Paket	79.998.400	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	30.169.800	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	27.152.720	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	27.152.720	
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 Laporan	6.000.000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 Laporan	5.100.000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 Laporan	6.000.000	
													Makan Minum Rapat		6.000.000	makan minum rapat telah terpakai untuk kegiatan pembentukan koperasi merah putih
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	49.247.500	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	26.122.200	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	49.247.500	lomba kelurahan/kegiatan provinsi dan nasional /rakor camat
													Perjalanan Dinas		49.247.500	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	[deleted] Jumlah aset/BMD yang diadakan	54 Unit	49.104.900	[deleted] Jumlah aset/BMD yang diadakan	54 Unit	41.188.900	Jumlah aset/BMD yang diadakan	93 Unit	283.381.250	

	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	49.104.900	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	41.188.900	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	93 Unit	283.381.250	
															41.188.900	
													AC Split	2	12.121.600	
													Proyektor	1	10.513.700	
													Scanner Epson DS410	2	18.553.600	
													Usulan		242.192.350	Kurangn ya fasilitas yang menduk ung setiap kegiata n
													Kelurahan Kp. I Skip			
													Proyektor 3 LCD (1024 X 768) XGA	1	10.513.700	
													Layar Proyektor dengan penagga kaki tripod	1	4.000.000	
													AC Split	2	12.121.600	
													PC Komputer	4	47.002.400	
													Scanner	1	9.276.800	
													Printer	1	6.119.910	
													4 Kelurahan (Pamusian, Sebengkok, Selumit dan Selumit Pantai)			Kurangn ya fasilitas yang menduk ung pelayan publik
													PC Komputer	4	47.002.400	
													Scanner	4	37.107.200	
													Printer	4	24.479.640	

													Kecamatan			
													Kipas Angin Turbo Dinding	5	7.018.300	kondisi ruang yang panas tidak memiliki pending in, meja dan kursi kondisi rusak
													Meja Rapat	1	19.790.400	
													Kursi Plastik	60	17.760.000	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	3 Layanan	423.083.700	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	3 Layanan	422.393.700	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	3 Layanan	422.393.700	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	3.780.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	3.780.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	3.780.000	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	295.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	295.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	295.000.000	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	124.303.700	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	123.613.700	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	123.613.700	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	60 Unit	200.602.100	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	60 Unit	122.137.300	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	60 Unit	322.137.300	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	39 Unit	95.560.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	39 Unit	17.095.200	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	39 Unit	17.095.200	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	70.202.100	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	70.202.100	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	70.202.100	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	0,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	0	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	200.000.000	

												Rehab Gedung Kantor Kecamatan		200.000.000	Perbaikan Instalasi Listrik, Instalasi Air, Ambblas dan Gudang Arsip	
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	34.840.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	34.840.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	34.840.000	
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100 %	25.000.000	Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100 %	25.000.000	Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100 %	25.000.000	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Kegiatan Pemerintahan yang dilimpahkan	1 Layanan	25.000.000	Jumlah Kegiatan Pemerintahan yang dilimpahkan	1 Layanan	25.000.000	Jumlah Kegiatan Pemerintahan yang dilimpahkan	1 Layanan	25.000.000	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	25.000.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	25.000.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	25.000.000	
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 %	3.726.020.000	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 %	4.197.402.000	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 %	4.590.402.000	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 Kegiatan	1.594.620.000	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 Kegiatan	1.590.282.000	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 Kegiatan	1.590.282.000	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	750.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	750.000.000,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	750.000.000	

	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	220 Pokmas / Ormas	804.620.000	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	220 Pokmas / Ormas	800.282.000,00	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	220 Pokmas / Ormas	800.282.000	
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	2.131.400.000	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	2.607.120.000	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	3.000.120.000	
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan	2.131.400.000	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan	2.607.120.000,00	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.120.000	Tambah an Tunjang an Ketua RT(Bank eu) 131 RT x 6 Bulan = 786 x 500.000 = 393.000 .000
													131 RT		1.886.400.000	
													11 RW		66.000.000	
													541 Dasawisma		649.200.000	
													makan minum rapat		5.520.000	
													Tambahan Tunjangan Ketua RT (Bankeu)		393.000.000	
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	29.982.500	Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	26.582.500	Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	26.582.500	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Kegiatan	4.992.500	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Kegiatan	4.192.500	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Kegiatan	4.192.500	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	4.992.500	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	4.192.500,00	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	4.192.500	

	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Kegiatan	24.990.000	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Kegiatan	22.390.000	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Kegiatan	22.390.000	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	24.990.000	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	22.390.000,00	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	22.390.000	
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	309.400.280	Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	298.767.780	Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	308.060.280	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang di selenggarakan	2 Layanan	309.400.280	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang di selenggarakan	2 Layanan	298.767.780	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang di selenggarakan	2 Layanan	308.060.280	
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	40 Orang	301.627.780	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	40 Orang	292.335.280,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	40 Orang	301.627.780	Penambahan Honor MC, Makan Minum Jamuan Tamu dan Fotocopy krn efisiensi
													Hadiah lomba MTQ		113.950.000,00	
													Uang Pembinaan, honor keamanan, MC dan pembaca doa		36.950.000,00	
													Sewa Dekorasi		32.500.000,00	
													Seragam kegiatan		28.000.000,00	
													makan minum kegiatan MTQ		59.400.000,00	
													piala		22.000.000,00	

												ATK , Bahan kaligrafi, baliho dan fotocopy		8.827.780,00	
	7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	15 Laporan	7.772.500	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	15 Laporan	6.432.500,00	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	15 Laporan	6.432.500
	J U M L A H								14.464.865.198			14.962.780.890,29		15.837.811.040	

3.2 PENDANAAN KERJA KECAMATAN TARAKAN TENGAH.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Tarakan Tengah Tahun 2025 di dukung oleh pendanaan yaitu dari anggaran APBDP Kota Tarakan Tahun 2025.

Pada Renja Perubahan ini terdapat beberapa perubahan antara lain :

1. Terdapat penambahan anggaran sebesar Rp 875.030.150,- yang semula Rp 14.962.780.890.29,- menjadi Rp 15,837.811.040,29-
2. Terdapat 7 (tujuh) sub kegiatan yang mengalami penambahan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Tarakan Tengah Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tarakan Tengah Tahun 2025-2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2024.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan serta sub kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tarakan Tengah.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Rencana Kerja Kecamatan Tarakan Tengah, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Kerja Kecamatan Tarakan Tengah maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Tarakan Tengah tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD.